WARTA PEMERIKSA

Edisi 01 | Vol. I - Januari 2018

Merajut Kebersamaan

HUT BPK Ke-71

Hal. 10-12

Ketua BPK, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA
"Dengan Kebersamaan Kita Dapat Mengatasi Semua Tantangan"

Hal. 22-23

Kata Mereka Tentang BPK, Sebuah Testimoni dari Orang Terkenal Hingga Masyarakat untuk BPK

Hal. 26-30

Pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Merajut Keber

samaan BPK RI

Pimpinan BPK
Periode 2017-2019

KETUA BPK RI
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA

WAKIL KETUA BPK RI
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A

ANGGOTA I BPK RI
Dr. Agung Firman Sampurna,S.E., M.Si

ANGGOTA II BPK RI
Dr. Agus Joko Pramono,M.Acc., Ak., CA

ANGGOTA III BPK RI
Achsanul Qosasi

ANGGOTA IV BPK RI
Prof. Dr. H. Rizal Djalil

ANGGOTA V BPK RI
Ir. Isma Yatun, M.T

ANGGOTA VI BPK RI
Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A

ANGGOTA VII BPK RI
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA

DARI REDAKSI

Perjalanan BPK selama tahun 2017 penuh dengan dinamika capaian dan pelajaran yang berharga yang menjadikan BPK lebih matang dalam mengemban amanat konstitusinya. Tahun 2017 BPK mencatat kali pertama menyampaikan hasil audit terhadap Badan Atom Dunia *(International Atomic Energy Agencies*/IAEA). Begitu pula, BPK kali pertama memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejak 12 tahun yang lalu. Untuk mendukung proses itu semua, BPK pada tahun 2017 melakukan penyempurnaan standar pemeriksaan, sistem informasi pemantauan tindak lanjut, dan membangun *Whistle Blowing System* (WBS).

Dinamika yang mewarnai penegakan nilai dasar independensi, integritas dan profesionalisme terjadi di tahun 2017. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga untuk BPK dalam memperkuat dan menjunjung tinggi marwah serta nilai dasar BPK. Mengawali tahun baru 2018 ini, Pimpinan BPK menekankan pentingnya penguatan nilai dasar yang dibalut dengan kebersamaan semua insan BPK untuk menegakkan kode etik dalam melaksanakan tugas pokok sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara. Merajut kebersamaan menjadi tema besar peringatan ke-71 yang jatuh pada awal Januari tahun ini. Harapannya, dapat mendorong kemampuan dan semangat insan BPK untuk menjalankan rencana besar kegiatan BPK dan tetap melanjutkan harapan memenuhi panggilan tugas konstitusi.

Edisi Januari 2018 dikemas dengan substansi dan format yang baru. Rubrik yang disajikan berisi berbagai aktivitas dan semangat kebersamaan dalam menyongsong hari jadi BPK ke-71 dan menyajikan substansi terkait dengan rencana kerja pemeriksaan tahun 2018, serta pentingnya isu tujuan pembangunan berkelanjutan.

Semoga, edisi perdana tahun 2018 yang juga mengubah nama dari **Warta BPK** menjadi **Warta Pemeriksa** dapat memberikan ragam dan kedalaman tentang dinamika organisasi dan pemeriksa BPK ke depannya.

PENGARAH
BAHRULLAH AKBAR
HENDAR RISTRIAWAN
BAHTIAR ARIF

PENANGGUNG JAWAB
R. YUDI RAMDAN

SUPERVISI PENERBITAN
GUNARWANTO

KETUA TIM REDAKSI
ADELINA SILALAHI

REDAKSI
JIMMY RAMDHANI
TETI PURWANTI
ANES SAPUTRA
POESPO KARTO
RHURIKO

KEPALA SEKRETARIAT
DAYU SANDRA TIURMA ULY

SEKRETARIAT
BESTANTIA INDRASWATI
NUSABELA
REZA HADI SATRIA
APRIYANA
R. DOEDI S.
SUDARMAN

ALAMAT REDAKSI
GEDUNG BPK-RI
JALAN GATOT SUBROTO NO.31
JAKARTA
TELEPON: 021-25549000
PESAWAT 1188/1187
FAKSIMILI: 021-57854096
EMAIL: WARTABPKRI@GMAIL.COM
DITERBITKAN OLEH:
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPOUBLIK INDONESIA

2-5 PROFIL
Pimpinan BPK
Periode 2017-2019

6-7 DAFTAR ISI

8 SURAT PEMBACA

9 TEKNOLOGI DIGITAL
BPK SIPADU
Permudah Masyarakat
Mengadu ke BPK

10-12 BPK BEKERJA
Ketua BPK, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA "Dengan Kebersamaan Kita Dapat Mengatasi Semua Tantangan"

13 QUOTE
Ketua BPK, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA

14-16 FEATURE
HUT BPK, Tingkatkan Sportivitas dan Semangat Kebersamaan Pegawai

17 FEATURE
Lintas BPK Perwakilan
Upacara Bendera Jadi Puncak Peringatan HUT BPK ke-71 di Bali dan Mataram

18 FEATURE
Lintas BPK Perwakilan
Geliat Peringatan HUT ke-71 BPK di Tarakan, Manado, Palu, dan Ambon

19 FEATURE
Lintas BPK Perwakilan
Medan, Bengkulu, dan Palembang Memeriahkan HUT BPK ke-71

20-21 FEATURE
Khitanan Massal "Ajang untuk Bersilaturahmi"

22-23 FEATURE
Kata Mereka Tentang BPK, Sebuah Testimoni dari Orang Terkenal Hingga Masyarakat untuk BPK

24-25 FEATURE WAYANG
Edukasi Melalui Unsur Budaya

26-30 SOROTAN
Pentingnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

32-33 SOROTAN
2018, BPK Jalankan Strategi Pemeriksaan Berkelanjutan

34-35 FEATURE
Apresiasi Keluarga Pegawai, Keakraban Keluarga Besar BPK dalam *Family Gathering*

36-37 FEATURE
Tidak Lupa Jasa Pendahulu, BPK Ziarah Makam Peringati HUT BPK Ke-71

38-39 FEATURE
Ragam Potensi Pegawai BPK dalam Kebersamaan

40-41 FEATURE
HUT Ke-71, BPK Masuk ke Ruang-ruang Publik

42-45 SOSOK
Sisi Lain Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan

46 FEATURE
Puncak Rangkaian HUT, BPK Gelar Pengajian

48-51 BERITA FOTO
Keceriaan HUT BPK KE-71

SURAT PEMBACA

Assalamualaikum Wr Wb

Puji Syukur kepada Tuhan YME, sehingga Majalah Warta Pemeriksa edisi Perdana Tahun 2018 dapat diluncurkan di bulan Januari 2018 ini. Sejak sebelum tahun 2018 ini, seringkali kami melihat para pembaca/pemirsa majalah Warta BPK menerima informasi yang mayoritas berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang bahasanya kurang dapat dipahami oleh masyarakat umum, seperti mahasiswa, pelajar dan anggota masyarakat lainnya. Untuk itu kami sangat bersyukur majalah Warta Tahun 2018 telah diluncurkan dengan tampilan dan nama yang berbeda. Kami berharap pergantian tampilan ini juga memberikan warna baru bagi para pembaca untuk dapat memahami dan menerima informasi yang disampaikan dari majalah Warta Pemeriksa dengan bahasa yang lebih ringan dan mudah dimengerti namun tidak mengurangi bobot kualitas materi yang disampaikan.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan ikut mendampingi serta membantu sampai terbitnya majalah Warta Pemeriksa. Kami juga ingin menyampaikan bahwa Warta Pemeriksa bisa mendorong para pembaca untuk turut menyampaikan tulisan berupa rubrik, jurnal, sepenggal cerita ataupun foto-foto peristiwa yang dapat memberikan warna dan memperkaya pengetahuan pembaca lain melalui majalah ini dengan mengirimkan Surat Pembaca melalui email wartabpkri@gmail.com. Karena kami menginginkan Warta Pemeriksa tidak hanya memuat hasil-hasil pemeriksaan dan personil ke-BPK-an namun juga ada sudut pandang tokoh-tokoh di luar BPK, maupun kegiatan lain yang menunjang kegiatan pemeriksaan serta informasi yang bersifat edukasi dan *'fun'*.

Sebelumnya ijinkan kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2018. Semoga tahun 2018 ini menjadi tahun yang penuh harap dan optimisme dalam berkarya dan mengabdi kepada Nusa Bangsa dan Tuhan YME.

Tim Sekretariat Redaksi Warta Pemeriksa

BPK SIPADU

Permudah Masyarakat Mengadu ke BPK

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, BPK telah memiliki media komunikasi berbasis android dengan nama SIPADU (Sistem Pemantauan Aplikasi Informasi Pengaduan). Aplikasi SIPADU adalah sebuah terobosan melalui *gadget* atau gawai yang mendorong masyarakat lebih efisien, efektif dan interaktif. SIPADU resmi diluncurkan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara pada acara Syukuran HUT BPK ke-71 pada 15 Januari 2018. Menurut Ketua BPK, meningkatnya pengaduan publik dan berkembangnya teknologi informasi, BPK menyiapkan media yang mudah, cepat dan informatif bagi publik untuk menyampaikan pengaduan dengan lebih mudah.

Saat ini, SIPADU dapat diunduh di *Play Store*. Nantinya aplikasi ini akan dikembangkan agar bisa diunduh melalui *App Store*. Untuk bisa mengakses SIPADU, setelah melakukan penginstalan di android , terlebih dahulu ***user*** harus melakukan registrasi melalui alamat pribadi sehingga pengadu dapat memantau perkembangan status tindak lanjut dari pengaduannya.

Selain melayani pengaduan, aplikasi ini juga memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang BPK yang terdapat dalam tiga menu utama yaitu Beranda, Hasil Pemeriksaan, dan Kiprah Global. Informasi umum tentang BPK sepert profil, visi dan misi, struktur organisasi, landasan hukum, lokasi Perwakilan, serta capaian BPK disajikan dalam menu Beranda. Selain itu, pengguna bisa memperoleh Informasi tentang hasil pemeriksaan BPK dan kiprah dan peran serta BPK di asosiasi lembaga pemeriksa baik regional maupun internasional pada dua menu berikutnya.

DI ULANG TAHUN BPK KE-71, KETUA BPK, DR. MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA, CA., CPA, MENGAJAK PARA PEGAWAI BPK UNTUK SEMAKIN MERAJUT KEBERSAMAAN.

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA, Ketua BPK

"DENGAN KEBERSAMAAN KITA DAPAT MENGATASI SEMUA TANTANGAN"

Berbicara tentang kerja sama, tentu tak lepas dari kebersamaan. Itulah yang ditekankan Moermahadi saat merayakan ulang tahun BPK ke-71. Tema ulang tahun kali ini adalah "BPK Merajut Kebersamaan". Tema ini sangat relevan karena dengan kebersamaan, kita dapat mengatasi semua tantangan dan hambatan dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

"Pada usia 71 tahun, telah banyak sumbangan BPK bagi kemajuan negara dan bangsa kita. Peningkatan opini WTP pada LKPP, LKKL, dan LKPD merupakan kontribusi besar BPK dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," katanya.

Ia menambahkan, BPK juga terus mendorong penggunaan keuangan negara benar-benar ditujukan untuk pencapaian tujuan bernegara. BPK berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas proses pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya serta terus memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitasnya. "Dengan demikian, diharapkan BPK dapat meningkatkan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara," lanjutnya.

Selama kurun waktu 12 tahun terakhir, BPK telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp132,16 triliun yang berasal dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti. Tak hanya itu, BPK telah membantu aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penegakan hukum.

Selama periode 2003 sampai dengan 2017, BPK menyerahkan 447 temuan berindikasi pidana senilai Rp44,74 triliun. Selama periode 2013 sampai dengan 2017, BPK menerbitkan laporan hasil penghitungan kerugian negara sebanyak 120 kasus senilai Rp56,93 triliun.

"Di tingkat internasional, BPK telah meningkatkan peran dan kontribusinya. BPK terpilih menjadi anggota *external auditor* independen untuk *International Anti Coruption Academy (IACA)*," ujarnya.

BPK juga menjadi anggota panel *external auditor* PBB yang bertugas sebagai lembaga pemeriksa untuk badan-badan dalam komunitas PBB. BPK terpilih kembali menjadi *external auditor* bagi Badan Atom Dunia atau *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk periode 2017-2019. Hal ini merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional kepada BPK.

BPK kembali memimpin Kelompok Kerja terbesar dalam organisasi lembaga pemeriksa sedunia (INTOSAI) yaitu *Working Group on Environmental Audit* untuk periode 2017-2019. Selain itu, BPK terlibat pada hampir seluruh *Working Group* INTOSAI, termasuk saat ini BPK akan bergabung dengan *Working Group on Big Data* yang sejalan dengan arah BPK menjadi *IT-driven organization.*

BPK SEMAKIN BERPRESTASI

Lebih lanjut Moermahadi memaparkan, di tingkat regional, BPK telah menjadi pengurus organisasi BPK se-Asia (ASOSAI). BPK juga menjadi pendiri ASEANSAI dan saat ini dipercaya sebagai *Long Term Secretariat* ASEANSAI periode 2017 – 2023. "Saat ini, BPK aktif dalam forum-forum dunia terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pemeriksaannya. BPK terlibat dalam pengembangan pedoman pemeriksaan SDGs di lingkungan INTOSAI," katanya.

Di Indonesia, BPK sedang melakukan persiapan pemeriksaan kesiapan SDGs, pemeriksaan kinerja atas capaian SDGs, serta pemeriksaan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan untuk mendukung pencapaian SDGs.

Selama periode Renstra 2016-2020, BPK terus berupaya untuk menyinergikan strategi pemeriksaan dengan agenda pembangunan nasional. BPK melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan tema dan fokus pemeriksaan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk dapat menyimpulkan atau menilai lebih dalam pencapaian Pemerintah dalam melaksanakan RPJMN tersebut.

"Oleh karena itu, kita harus memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi setiap satuan kerja dalam melaksanakan strategi pemeriksaan ini. Strategi pemeriksaan yang kita laksanakan diharapkan meningkatkan nilai dan manfaat lembaga pemeriksa terhadap kehidupan rakyat," tuturnya.

Upaya melaksanakan strategi pemeriksaan sesuai dengan renstra ini bukan hanya memberikan manfaat bagi *stakeholder,* namun juga bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada BPK. Dengan kepercayaan tersebut, reputasi BPK akan semakin baik dalam mengawal pembangunan nasional dan turut berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan itu, BPK berkomitmen untuk meningkatkan penguatan kinerja pemeriksaan dan kelembagaan melalui tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional. BPK telah membangun sistem pengendalian dan pengawasan intern, *whistle blowing system*, dan mekanisme pengaduan

masyarakat, serta memiliki Majelis Kehormatan Kode Etik, guna mencegah dan memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme BPK.

Pada bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM), khususnya jabatan fungsional, saat ini BPK tengah mengajukan perubahan Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP). Pengajuan revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan tentang JFP tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

BPK juga menerbitkan keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 498 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JFP melalui Penyesuaian/ *Inpassing*, yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

"Dengan ketentuan ini, maka PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam keputusan tersebut, dapat diangkat menjadi JFP melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing* setelah lulus uji kompetensi JFP," lanjutnya.

PNS yang diangkat melalui penyesuaian/ inpassing dapat menduduki JFP sesuai dengan kepangkatan terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan, sebagai contoh untuk golongan ruang III/a dan III/b dapat menduduki jabatan Pemeriksa Pertama dan untuk golongan ruang III/c dan III/d dapat menduduki jabatan Pemeriksa Muda.

Sedangkan pada aspek reformasi kelembagaan, khususnya proses bisnis/ ketatalaksanaan, telah dilakukan penyempurnaan proses pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui pengembangan Sistem Informasi

Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat menyinergikan hubungan antara BPK dan entitas dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Sebagai kelanjutan dari kegiatan tersebut, BPK akan menyempurnakan dan mengoptimalkan proses bisnis pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi *(e-government)* sehingga proses pemeriksaan ke depan akan lebih efektif, efisien, berkualitas dan transparan.

Selain itu, Inspektorat Utama BPK mendapatkan predikat tingkat kapabilitas level 3 *(Integrated)* dari *the Institute of Internal Auditor* pada tahun 2017. Sedangkan, pemerintah melalui RPJMN 2015-2019 menargetkan kapabilitas *internal auditor* mencapai level 3 pada 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa BPK telah melaksanakan tata kelola dan praktik-praktik pemerolehan keyakinan mutu dan pemberian jasa konsultasi secara profesional di lingkungannya sesuai dengan kriteria internasional.

"Dengan semangat sinergi antara lembaga pemeriksa BPK dan lembaga pengawas internal, BPK telah mengembangkan Pusdiklat menjadi unit Eselon I, yaitu Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang telah ditetapkan pada akhir September 2017," katanya.

Badan Diklat diharapkan menjadi wadah sinergi antara BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah serta Pengawas Internal pada BUMN/ BUMD/ Lembaga Lainnya melalui peningkatan peran Badan Diklat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, serta akreditasi. Melalui sinergi ini diharapkan pemeriksaan menjadi lebih efisien, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi lebih efektif, serta pengelolaan keuangan negara menjadi lebih akuntabel dan transparan.

MENDAPAT UJIAN

Pada tahun 2017 yang lalu, BPK mengalami berbagai macam ujian. "Kita harus menyadari bahwa proses bisnis BPK memiliki risiko tinggi, rawan terhadap gangguan independensi dan integritas misalnya penawaran fasilitas yang dibiayai oleh entitas," tuturnya.

Oleh karena itu, Moermahadi tidak bosan-bosannya mengingatkan, untuk selalu menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme agar martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK selalu terjaga.

"Marilah kita senantiasa meminta bimbingan dan petunjuk Allah Yang Maha Kuasa agar menguatkan kita dalam membangun bangsa dan negara ini. Semoga semua langkah kita dijadikan sebagai ladang amal ibadah dan kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Aamiin," tutupnya.

Opini BPK atas laporan keuangan bukanlah "hadiah" dari BPK. Sebagai lembaga pemeriksa, tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

(KETUA BPK MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA,
ISTANA BOGOR, 5 DESEMBER 2017)

HUT Ke-71 BPK

"Tingkatkan Sportivitas dan Semangat Kebersamaan Pegawai"

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN (HUT) YANG KE-71, SECARA INTERNAL, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA. SEBAGAI INSTITUSI *AUDITOR*, BPK MENYADARI BAHWA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) INSTITUSINYA MERUPAKAN ASET TERPENTING AGAR DAPAT MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI BPK DENGAN BAIK. KARENA ITU, PEKAN OLAHRAGA DIPILIH SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN PENGEMBANGAN SDM, DALAM HAL INI GUNA MENGEMBANGKAN KUALITAS JASMANI DAN ROHANI PARA AWAK BPK.

Dengan mengusung tema "BPK Merajut Kebersamaan", Pekan Olahraga melibatkan seluruh unsur SDM di BPK, dari unsur pimpinan hingga pelaksana. Dalam sambutannya saat membuka Pekan Olahraga, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara berharap kegiatan tersebut dapat semakin mempererat silaturahmi di internal BPK.

"Sejalan dengan tema ini diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat meningkatkan kebersamaan sehingga lebih mempererat tali silaturahmi seluruh keluarga besar BPK," kata Moermahadi (17/11/2017).

Selain Pekan Olahraga, peringatan HUT ke-71 BPK diisi dengan berbagai macam kegiatan lainnya, seperti lomba gerak jalan, BPK *talent's show,* lomba *blogger,* ziarah ke makam pendahulu BPK, khitanan massal, donor darah, hingga *family gathering.* Moermahadi mengimbau agar rangkaian kegiatan tersebut dijadikan sebagai media perekat kebersamaan demi membangun BPK yang lebih besar.

"Berbagai lomba yang dilaksanakan bukan untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah, tetapi untuk membangun sportivitas dan membangun semangat kebersamaan," ujarnya.

Lomba gerak jalan merupakan salah satu kegiatan yang mendapatkan antusiasme tinggi dari pegawai BPK. Tak tanggung-tanggung, dengan menggandeng Persatuan Gerak Jalan Provinsi DKI Jakarta, kegiatan yang diselenggarakan pada Minggu (14/1/2018) tersebut diikuti oleh 1.157 peserta, termasuk Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Anggota V BPK Isma Yatun, dan Anggota VI BPK Harry Azhar Azis.

Terbagi dalam kategori beregu putra, beregu putri, serta perorangan putra dan putri, gerak jalan ini bermula dari Kantor Pusat BPK. Kemudian peserta

mengikuti rute dengan melewati Simpang Semanggi, Jalan Jend. Soedirman, Bunderan HI, dan berakhir di kawasan Tugu Monumen Nasional (Monas). Para peserta akan memperebutkan hadiah berupa piala, piagam, dan uang pembinaan apabila memenuhi kriteria lomba yang telah ditetapkan, yaitu ketepatan waktu, keutuhan regu, dan kerapian dalam baris-berbaris.

Pada tahun ini, selain berasal dari pegawai BPK Pusat, peserta khusus berasal dari perwakilan BPK Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Banten. Selain itu, acara dimeriahkan Reog oleh Polda Metro Jaya dan juga Fariz RM sebagai penutup acara.

Selain gerak jalan, Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-71 BPK tersebut juga memperlombakan cabang olahraga lain, seperti futsal, bola voli, tenis meja, dan bulutangkis. Kesuksesan penyelenggaraan rangkaian kegiatan HUT tersebut diharapkan semakin meningkatkan kinerja SDM BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPK sehari-hari.

Lintas BPK Perwakilan

UPACARA BENDERA JADI PUNCAK PERINGATAN HUT BPK KE-71 DI BALI DAN MATARAM

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN (HUT) BPK KE-71 YANG JATUH PADA TANGGAL 1 JANUARI 2018, SEGENAP PELAKSANA KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN UNIT-UNIT PENDUKUNGNYA DI LINGKUP KERJA BPK SELURUH INDONESIA MENGGELAR KEGIATAN UPACARA BENDERA DI KANTOR PERWAKILAN MASING-MASING. DI KANTOR PERWAKILAN BPK DI BALI DAN MATARAM, LOMBOK, UPACARA BERLANGSUNG KHIDMAT.

Di Bali, upacara diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali mulai pukul delapan pagi waktu setempat. Dipimpin oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho, upacara berlangsung khidmat. Terlebih karena para peserta upacara mendengarkan lintasan-lintasan sejarah perkembangan Badan Pemeriksa Keuangan sejak berdiri pada 1 Januari 1947 hingga sekarang.

Dari semula hanya mempunyai sembilan pegawai—di bawah pimpinan R. Soerasno—ketika didirikan di Magelang pada 1947, saat ini BPK telah memiliki 34 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Para peserta upacara diingatkan bahwa sepanjang sejarahnya, BPK yang dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 23 ayat 5, terus berbenah dan memperbaiki diri agar dapat menjadi lembaga pemeriksa keuangan yang mendukung cita-cita tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Sementara itu, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, upacara bendera juga berlangsung tak kalah khidmat. Pada upacara tersebut, jajaran petinggi dan pegawai di lingkup kantor BPK Perwakilan NTB diingatkan agar selalu dapat menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme. Tujuannya, tentu agar martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK dalam melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan selalu terjaga.

Perayaan HUT ke-71 di NTB juga dimeriahkan dengan serangkaian perlombaan yang dilaksanakan selama satu minggu (8-12 Januari 2018). Cabang-cabang yang diperlombakan adalah tenis meja, bulutangkis, futsal, hingga lomba hiburan berupa adu cepat makan kerupuk estafet, memasukkan paku ke dalam botol, hingga lomba karaoke yang diberi tajuk BPK NTB *Idol*.

Rangkaian lomba ditutup pada Jumat, 12 Januari 2018 dengan acara berupa jalan sehat bersama di sekitaran Jalan Udayana, Kota Mataram. Selain acara pembagian hadiah, panggung juga dimeriahkan dengan pembagian *door prize* serta pengumuman pegawai teladan terpilih di lingkup BPK Perwakilan Provinsi NTB berdasarkan kinerja selama tahun 2017. Kali ini, para pegawai teladan yang terpilih adalah Sahidun, Helmy Fanfani, dan Nurul Habibah. Keseluruhan rangkaian acara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama.

Lintas BPK Perwakilan

GELIAT PERINGATAN HUT KE-71 BPK DI TARAKAN, MANADO, PALU, DAN AMBON

INDEPENDENSI, INTEGRITAS, DAN PROFESIONALISME. KETIGA HAL ITU MERUPAKAN PESAN-PESAN YANG MENGEMUKA DALAM UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HUT BPK KE-71 DI KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DI TARAKAN, SENIN, 15 JANUARI 2018. KETIGA PESAN TERSEBUT MENGIRINGI TEMA UTAMA YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKAIAN PERINGATAN HUT BPK DI SELURUH KANTOR PERWAKILAN SE-INDONESIA, YAKNI "MERAJUT KEBERSAMAAN".

Mulai pukul 08.15 WITA sampai selesai, upacara bendera dilangsungkan di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Upacara diikuti oleh para pejabat struktural dan seluruh pegawai. Upacara dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, Tornanda Syaifullah yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam pidato tertulis oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang dibacakan oleh Inspektur Upacara di Tarakan, dinyatakan bahwa selama kurun waktu 12 tahun terakhir, BPK telah menyelamatkan keuangan negara sebesar 132,16 triliun rupiah. Angka tersebut berasal dari rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti. Selain itu, selama periode 2003-2017, BPK menyerahkan 447 temuan berindikasi pidana senilai 44,74 triliun rupiah. Sedangkan selama periode 2013-2017, tercatat 120 kasus senilai 56,93 triliun rupiah yang telah dilaporkan oleh BPK melalui laporan hasil penghitungan kerugian negara.

Sementara itu di Manado, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan rangkaian acara Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) selama lima hari (8-12 Januari 2018). Salah satu mata rantai acara peringatan HUT BPK ke-71 ini diikuti oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengatakan bahwa tujuan penyelengaraan Porseni tidaklah semata-mata untuk mencari juara. Akan tetapi, yang lebih penting adalah untuk meningkatkan kebersamaan yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Hal ini selaras dengan tema nasional dalam HUT BPK ke-71 yaitu"Merajut Kebersamaan".

Di Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di lapangan kantor BPK Perwakilan setempat, upacara peringatan HUT BPK ke-71 dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Khabib Zainuri. Upacara yang dilangsungkan pada 15 Januari 2018 itu menyusul rangkaian acara sebelumnya, yakni doa bersama dan pelepasan balon pada Minggu, 14 Januari 2018. Jalan santai, donor darah, serta senam Maumere juga diselenggarakan di Palu.

Di Ambon, segenap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku mengikuti upacara bendera yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, sebagai Inspektur Upacara. Dibacakan pula pidato tertulis Ketua BPK yang antara lain mencatat terpilihnya BPK menjadi anggota panel *external auditor* di lingkup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Termasuk sebagai *external auditor* bagi Badan Atom Dunia *(International Atomic Energy Agency, IAEA)* untuk periode 2017-2019.

Lintas BPK Perwakilan

MEDAN, BENGKULU, DAN PALEMBANG MEMERIAHKAN HUT BPK KE-71

KEPALA PERWAKILAN BPK KANTOR PERWAKILAN SUMATRA UTARA, AMBAR WAHYUNI, MEMIMPIN UPACARA BENDERA DALAM PERINGATAN HUT KE-71 BPK YANG DIIKUTI OLEH PARA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPK PERWAKILAN DI KOTA MEDAN. AMBAR WAHYUNI MENYEBUTKAN BAHWA KE DEPANNYA, ADALAH TUGAS BERSAMA UNTUK TERUS MENINGKATKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BPK.

Para peserta upacara diingatkan bahwa dalam setiap peringatan ulang tahun BPK, peningkatan kinerja dan berita positif senantiasa ditunggu untuk menghiasi perjalanan sejarah BPK. Setelah selesai upacara, acara peringatan dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara, perkenalan pegawai yang baru pindah tempat tugas, pemotongan tumpeng, dan santap bersama.

Di tempat lain, dalam perayaan serupa, suatu acara yang unik digelar oleh Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Setelah upacara bendera yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Yuan Candra Djaisin sebagai Inspektur Upacara, dan Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi Iwan Sukma Permana sebagai Komandan Upacara, dilangsungkan pula pemotongan tumpeng dan lomba memasak.

Seluruh pegawai di lingkup kerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengikuti keceriaan lomba memasak ini. Sebelumnya, diselenggarakan pula pertandingan beberapa cabang olahraga mulai tanggal 3 hingga 8 Januari 2018, disusul sehari kemudian oleh rangkaian lomba *Play Station,* balap karung, bakiak, memasukkan paku dalam botol, dan tarik tambang. Keseluruhan lomba menarik itu digelar di *Sport Center* Kantor BPK Perwakilan Bengkulu.

Masih dari Sumatra, perayaan HUT BPK ke-71 di Kota Palembang diisi dengan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh para pegawai Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatra Selatan. Acara tersebut diselenggarakan di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, Maman Abdulrachman, melakukan pelepasan balon serta pengibaran bendera *start* sebagai tanda dimulainya acara jalan santai. Melalui jalan santai bersama, tali silaturahmi di antara para pegawai BPK dan instansi terkait diharapkan meningkat. Setelah jalan santai selesai, suasana dimeriahkan pula oleh pertunjukan band serta pembagian *door prize.*

Khusus tahun ini, Kantor BPK Perwakilan Sumatra Selatan mengusung tema pendamping yang mengiringi tema utama yakni "Merajut Kebersamaan". Tema pendamping tersebut adalah "Rapatkan Barisan, Tegakkan Integritas, Jaga Independensi, dan Tingkatkan Profesionalisme untuk Mewujudkan BPK sebagai Lembaga Kredibel".

Khitanan Massal
"Ajang untuk Silaturahmi"

KHITANAN MASSAL DIGELAR DALAM RANGKA ULANG TAHUN BPK KE-71. SELAIN UNTUK KEGIATAN SOSIAL, KHITANAN MASSAL INI JUGA MENJADI AJANG SILATURAHMI PARA PEGAWAI BPK.

Tepuk tangan terdengar di sudut masjid di gedung BPK ketika Ketua BPK Dr. Moermahadi Soerja Djanegara memasuki pelataran masjid. Para pengunjung masjid, yang merupakan keluarga para pegawai BPK, sudah menunggu-nunggu kehadiran Moermahadi untuk membuka acara khitanan massal tersebut.

Menurut Moermahadi acara khitanan massal merupakan rangkaian acara ulang tahun BPK ke-71. *"Alhamdulillah,* khitanan massal ini diikuti oleh 30 anak-anak. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar keluarga besar BPK," kata Moermahadi dalam sambutannya.

Moermahadi juga menambahkan, khitanan massal ini mempermudah keluarga karyawan BPK untuk mengkhitan anak-anaknya. "Seperti yang kita tahu, khitan adalah salah satu aturan Islam yang wajib dilakukan oleh laki-laki," lanjutnya.

Namun begitu, khitanan massal yang digelar oleh BPK ini tak hanya diperuntukkan untuk yang beragama Islam, tapi juga untuk orang-orang yang membutuhkannya.

"Saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu acara ini. Semoga menjadi ladang pahala. Untuk "anak-anakku" semoga lekas sembuh dan menjadi anak anak yang soleh. Semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa," tutup Moermahadi yang disambut ucapan amin oleh para pegawai BPK.

MASAYARAKAT HINGGA PUBLIK FIGUR MENGUCAPKAN ULANG TAHUN UNTUK BPK YANG KE-71. TERSELIP DOA DAN HARAPAN UNTUK BPK. APA SAJA ITU? BERIKUT TESTIMONI MEREKA.

Kata Mereka Tentang BPK

Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah
"Semoga di usianya yang ke-71 BPK bisa mengajari kita bagaimana e-audit, bagaimana transparansi penggunaan anggaran, dan bagaimana pelaporan anggaran yang benar sehingga duit negara tidak hilang"

Febri Diansyah, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
"Sebagai salah satu mitra KPK, tentu saja peran BPK sangat penting untuk menjaga proses pengawasan keuangan dan juga untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, karena audit-audit yang dilakukan BPK sangat membantu kerja KPK dan institusi penegak hukum lain"

Abang-None Jakarta
"Selamat ulang tahun BPK RI, semoga makin berkualitas dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia"

Audrey, Masyarakat
"Selamat ulang tahun untuk BPK Republik Indonesia ke-71. Semoga BPK Republik Indonesia semakin meningkat kualitas kerjanya sehingga semakin bermanfaat untuk negara Indonesia."

Putri Pariwisata Indonesia 2017, Astari Indah Vernideani, dan *Miss Tourism Cosmopolitan International Indonesia 2017*, Lois Merry Tangel
"Selamat ulang tahun buat BPK Republik Indonesia yang ke-71. Semoga, BPK RI tetap terus semangat dan jangan pernah menyerah memeriksa laporan keuangan di negara kita, Republik Indonesia. BPK jaya!"

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani
"Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-71 untuk Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, sebuah institusi yang sangat penting di dalam konstitusi kita, di dalam menyelenggarakan akuntabilitas tata kelola di bidang keuangan di Indonesia. BPK adalah tulang punggung bagi kuatnya ekonomi dan penyelenggaraan keuangan di Indonesia. Saya berharap BPK akan makin meningkatkan kualitas, kredibilitas, kemampuan di dalam mendukung cita-cita kita yaitu mencapai Indonesia yang sejahtera, adil dan bermartabat. Terima kasih, selamat ulang tahun kepada BPK."

Najwa Sihab, Presenter
"Selamat ulang tahun ke-71 kepada BPK semoga bisa terus profesional, semoga bisa terus menjaga amanah dan semoga bisa terus memberi yang terbaik untuk Negeri, amin,"

Ardan Adiperdanan, Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
"Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Idonesia yang ke-71. Semoga sukses mengamankan pengelolaan dan pertanggung jawaban Negara"

Theresia & Hotma, Masyarakat
"Selamat ulang tahun untuk BPK RI ke 71, semoga semakin jaya dan bermanfaat untuk warga negara Indonesia"

Edukasi Melalui Unsur Budaya

JAKARTA DI ERA DIGITAL DAN MENINGKATNYA PERAN MASYARAKAT, BADAN PEMERIKSAN KEUANGAN (BPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA TIDAK MAU KETINGGALAN UNTUK MENGAJAK PERAN SERTA MASYARAKAT DEMI TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN.

Selain sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT BPK yang ke-71, juga untuk mewujudkan visi dan misi BPK, diadakan pertunjukan wayang golek dengan tema "Kawal Harta Negara". Pertunjukan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara membutuhkan lembaga pemeriksa keuangan yang menjunjung nilai independensi, integritas dan profesionalisme.

"Momen ini menjadi tepat untuk mensosialisakan visi dan misi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan dan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal pengelolaan keuangan negara/daerah," kata Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua BPK RI.

Setidaknya 400 orang hadir pada pertunjukan wayang golek yang diadakan pada Sabtu (20/1/18) di Kantor PUsat BPK. Acara ini juga dihadiri oleh, Pimpinan BPK, Pegawai Pusat, Mantan Pimpinan BPK, Tamu Undangan dari Lembaga dan Kementerian, Tamu undangan dari Tokoh Masyarakat, serta Pemerhati Budaya.

Pada malam budaya tersebut, ditampilkan pertunjukan wayang golek berjudul "Semar Gugah" dengan Ki Dalang Kiki Mardani Sunarya dan Putra Giri Hardja 5. Pertunjukan merefleksikan upaya bersama masyarakat dalam menjaga dan mengawal pembangunan sebuah negara dengan mengedepankan kerja keras, kebersamaan, dan tanggung jawab yang didasarkan penegakan nilai luhur kehidupan dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Pentingnya
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA – DEKLARASI MILENIUM HASIL KESEPAKATAN KEPALA NEGARA DAN PERWAKILAN DARI 189 NEGARA ANGGOTA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) PADA TAHUN 2000 TELAH MENGHASILKAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM ATAU *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS* (MDGS). DELAPAN BUTIR TUJUAN DALAM DOKUMEN TERSEBUT DITARGETKAN DAPAT TERCAPAI DALAM 15 TAHUN PELAKSANAANNYA, TEPATNYA PADA TAHUN 2015. DALAM RENTANG WAKTU TERSEBUT, INDONESIA BERHASIL MENCAPAI 49 DARI 67 TARGET INDIKATOR YANG DITETAPKAN. ADAPUN TARGET UTAMA DARI MDGS ADALAH TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI AKHIR TAHUN TARGET.

Resmi berakhir pada tahun 2015, cita-cita mulia MDGs tidak berakhir sampai di situ. Pada September 2015, bertempat di Markas PBB di New York, sebanyak 193 negara anggota PBB menggelar pertemuan *Sustainable Development Summit*. Pertemuan tersebut mengesahkan kelanjutan dari cita-cita MDGs yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau di Indonesia dikenal dengan nama Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (TPB), yang juga merupakan penyempurnaan dari MDGs.

MDGs sebagai tujuan jangka menengah dirasa masih memiliki beberapa kekurangan, seperti gagalnya pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan serta tidak masuknya aspek lingkungan dan sosial dalam indikator keberhasilan MDGs. Selain itu, data yang kurang dan monitoring yang tidak dilakukan secara berkelanjutan menyebabkan kesalahan yang terjadi sering kali terulang. Secara singkat, MDGs hanya melihat pembangunan secara inklusif. Padahal, pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri dan harus berkesinambungan.

Berbeda dengan MDGs, dokumen SDGs berisi 17 tujuan yang terbagi dalam 169 target sebagai agenda dunia pembangunan untuk kehidupan manusia yang lebih baik, mulai dari tahun 2015 hingga 2030. Tujuan tersebut tertuang dalam paragraf 51 Resolusi PBB Nomor A/RES/70/1 dengan judul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*". Resolusi itu merupakan agenda pembangunan pasca-2015 sebagai pengganti MDGs.

Anggota II BPK, Agus Joko Pramono

Meski sebanyak 193 negara mengesahkan SDGs, namun belum seluruh negara tersebut terlibat dalam mekanisme *Voluntary National Review* (VNR). VNR merupakan mekanisme monitoring pencapaian SDGs dari setiap negara anggota PBB yang termaktub dalam dokumen SDGs. Hingga pertengahan tahun 2017 lalu, tercatat baru 44 negara yang menyampaikan VNR.

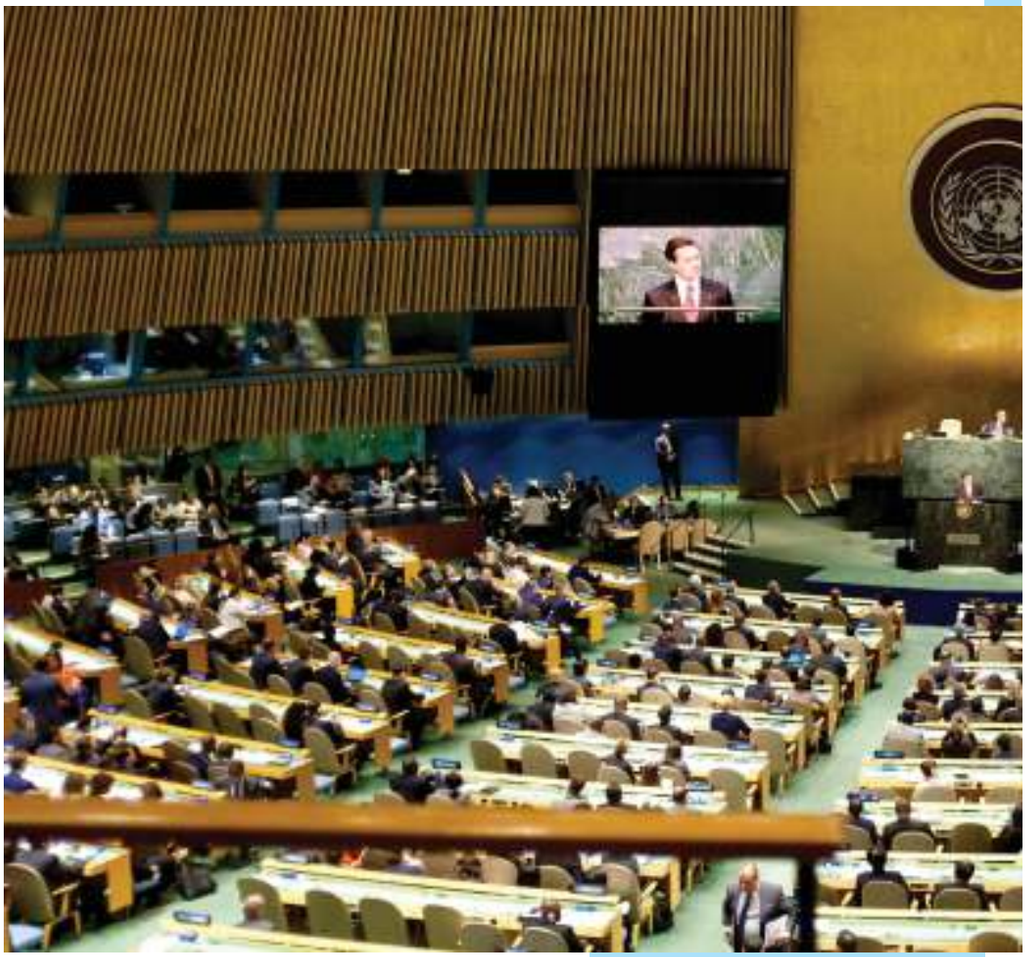

Meski baru mengajukan VNR pada 2017, hal itu menunjukkan bahwa SDGs bagi Indonesia bukan hanya sekadar komitmen global, melainkan panduan Indonesia untuk menuju negara yang lebih maju. Penyampaian VNR tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen Indonesia untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030.

Penyampaian VNR tersebut dilakukan Indonesia setelah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Presiden dalam kesempatan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di

Hamburg Messe Und Congress, Jerman, pada Juli 2017.

Perpres tersebut menetapkan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang selaras dengan SDGs atau TPB, dan selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan.

Dalam Perpres tercantum, Sasaran nasional TPB digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan pemerintah daerah (pemda) dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB.

Selain itu, sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Dalam pencapaian target TPB yang merupakan agenda dunia dalam pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi itu, tentu dituntut keterlibatan banyak pihak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga pemeriksa, perlu turut ambil bagian dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam mencapai target SDGs.

Berdasarkan *International Conference of International Organization of Supreme Audit Institutions* (Incosai) yang dilakukan empat tahun sekali, BPK di seluruh dunia telah menyepakati bahwa prioritas rencana strategis Intosai nomor satu yang harus dilakukan adalah audit SDGs pada semua anggota Intosai di negara masing-masing.

Salah satunya adalah Audit SDGs yang dilakuan oleh BPK Indonesia untuk melihat kesiapan negara dalam mencapai target dari SDGs. Kesiapan dianggap penting agar kegagalan yang dialami oleh MDGs tidak terulang.

Agus Joko Pramono Anggota II BPK menjelaskan bahwa SDGs adalah tujuan semua negara. Ditambah lagi keterlibatan BPK RI cukup tinggi. "Kita mulai sejak MDGs dan ditambah lagi kita terlibat di dalam organisasi BPK sedunia yang di dalamnya membuat panduan bagaimana cara BPK masing-masing negara melakukan pemeriksaan," jelas Anggota BPK yang biasa dipanggil AJP tersebut.

Sejak diluncurkannya SGDs, BPK di Indonesia ikut serta dalam mengembangkan panduan untuk mengaudit persiapan pemerintah dalam pelaksanaan hingga sekarang ini. Tidak tanggung-tanggung, BPK juga terus mengikuti pertemuan tingkat dunia, yang terakhir adalah pertemuan di Korea Selatan.

"Pada pertemuan terakhir yang menjadi poin adalah apakah sumber daya milik suatu negara sudah digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat dan itu merupakan kriteria untuk tujuan poin nomor 16, terutama 16.5," ungkap AJP.

Tujuan ke-16 dari SDGs adalah Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan secara khusus BPK akan berperan penting pada tujuan 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Indikator-indikator untuk mencapai tujuan 16.5 ada dua indikator khusus yang meliputi, indeks perilaku anti korupsi dan indeks persepsi korupsi.

Sayangnya, dengan adanya indeks-indeks tersebut tidak dengan mudah untuk dilaksanakan. Kendala SGDs, adalah posisinya yang masih termonologi asing, bukan hanya di akar rumput bahkan di pengambil kebijakan. "Jadi sebelum kita masuk ke SGDs, jadi harus jelaskan dulu SDGs itu apa dan model implementasinya seperti apa. Kita juga sudah meminta Bappenas untuk terus menyosialisasikan," jelas AJP.

Untuk itulah, visi BPK ke depan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan. Untuk meningkatkan kualitas, bukan hanya kualitas pemeriksaan. Namun juga kualitas personal, *prosuder,* peralatan, fasilitas, metodologi, teknik memeriksa, dan tata cara kerja.

"Kami senantiasa kita meningkatkan pemeriksaan dan juga tata cara kerja lembaga," tegas AJP.

Sedangkan secara manfaat juga, BPK berharap pemeriksaan yang dilakuan mampu mendorong capaian tujuan negara ini serta organisai dari berbagai arah.

"BPK masing-masing negara diminta untuk mengaudit kesiapan kerangka kebijakan dan data di negara masing-masing," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Yudi Ramdan Budiman.

Menurut Yudi, tujuan pemberdayaan BPK seluruh dunia adalah untuk memonitor progres pencapaian masing-masing pemerintah. Untuk Indonesia sendiri, ada pekerjaan rencana aksi dan *roadmap* yang belum selesai dan harus diselesaikan pada tahun 2018 ini.

"Ini akan dilihat oleh BPK karena BPK punya Renstra (Rencana Strategis) yang sudah sejalan dengan SDGs," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Yudi menambahkan, BPK akan melakukan audit kesiapan impelementasi SDGs terhadap Bappenas dan BPS. Dari audit itu diharapkan BPK dapat menilai sisi kelayakan data yang akan menjadi basis pemeriksaan selanjutnya.

Demi mendukung SDGs, BPK berperan dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan integritas pemerintah. Selain itu, entitas sektor publik dalam rangka memenuhi ISSAI 12 *(The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions – making a difference to the lives of citizens)* juga harus ditingkatkan.

Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK sebagai unit pelaksana pengelolaan dan pelayanan informasi publik, bertugas untuk melayani permintaan informasi dan pengaduan dari publik/masyarakat.

Beberapa cara yang dapat digunakan oleh publik/masyarakat untuk memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan melalui PIK BPK, yaitu:

1. Melalui telepon : (021) 25549000 ext. 3912
2. Melalui faksimili : (021) 57950288
3. Melalui kotak surat : PO BOX 4300 JKT 10043
4. Melalui website : www.bpk.go.id
5. Melalui email : ksbhumas@bpk.go.id
6. Melalui pos : Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
7. Datang langsung : Pusat Informasi dan Komunikasi BPK Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Waktu Operasional PIK

PIK melayani publik/masyarakat setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) dengan jam operasinal sebagai berikut:

1. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 15.00 wib
   Istirahat :12.00 s.d. 13.00 wib
2. Jumat : 09.00 s.d. 15.00 wib
   Istirahat : 11.30 s.d. 13.00 wib

PERSYARATAN PERMINTAAN INFORMASI

Publik/masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Mengisi formulir permintaan informasi publik dan tanda terima penyerahan dokumen informasi publik;
3. Melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/ID Card);
4. Jika berasal dari instansi/lembaga, harus menyertakan surat pengantar/permohonan tertulis dari instansi/lembaga yang bersangkutan;
5. Jika berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), harus melampirkan akta pendirian LSM;

Wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber perolehan informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERSYARATAN PENGADUAN MASYARAKAT

Publik/masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia (WNI);
Mengisi formulir pengaduan masyarakat;
Melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/ID Card);
Dapat menjelaskan siapa, apa, bilamana, dimana dan bagaimana kejadian yang dilaporkan (kronologis aduan);
Melampirkan bukti awal aduan, seperti: fotokopi dokumen, foto atau barang lain yang dapat memperkuat uraian aduan yang disampaikan.

Alur Pengaduan Masyarakat (bisa diunduh di *http://www.bpk.go.id/page/layanan-pusat-informasi-dan-komunikasi--pik-*)

2018, BPK Jalankan Strategi Pemeriksaan Berkelanjutan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DENGAN TANGGGUNG JAWABNYA UNTUK MEMERIKSA SELURUH UNSUR KEUANGAN NEGARA BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI TINGKAT DAERAH, MELALUI PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA, DAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU SENANTIASA MEMANTAPKAN PERANNYA SEBAGAI SATU-SATUNYA LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA YANG BEBAS DAN MANDIRI.

BPK juga berupaya mencapai visinya yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Untuk mencapai visi tersebut, disiapkan dua misi. Misi yang pertama memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sedangkan yang kedua, melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Dali Mulkana, Kepala Direktorat Perencana Strategis dan Manajemen Kinerja BPK mengatakan untuk mencapai target-target, BPK telah menyusun Peta Strategis yang menggambarkan sasaran-sasaran strategis yang ingin diwujudkan dalam kurun periode Renstra 2016-2020. Rencana Strategis 2016-2020 juga memuat strategi pemeriksaan BPK berupa penetapan tema dan fokus pemeriksaan.

Penetapan tema dan fokus pemeriksaan bertujuan agar BPK dapat memberikan penilaian atas program pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah

secara lebih terinci dan mendalam. Sepanjang 2016-2020, tema dan fokus pemeriksaan BPK terbagi menjadi 12 tema dan 18 fokus. Bila pada tahun-tahun sebelumnya, tema dan fokus serta koordinator AKN bekerja sendiri-sendiri. Tahun ini, dipastikan semua bekerja dengan lebih bersinergi.

"Secara umum, strategi pemeriksaan dengan tema dan fokus yang tertuang dalam Renstra 2016-2020 adalah untuk memberikan penilaian yang mendalam terhadap implementasi RPJMN 2015-2019 yang dilaksanakan pemerintah. Dengan demikian BPK mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus mengawal pencapaian tujuan bernegara. Untuk bisa melakukan hal tersebut strategi pemeriksaan BPK dilakukan secara berkelanjutan selama periode Renstra dan memerlukan keterlibatan antar satker agar program nasional yang diperiksa bisa dinilai secara kebih komprehensif," jelas Dali. Ditambahkan Dali, 2018 adalah tahun implementasi untuk pemeriksaan tema dan fokus maupun inisiatif strategi, karena hampir semua yang ada di dalam Renstra BPK bisa mulai dilakukan pada tahun ini. "Tahun ini BPK sudah bisa dijadikan contoh lembaga yang bisa menerapkan ***e-Govt*** karena Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan juga telah bekerja keras," ungkap Dali.

Selain itu, BPK juga berusaha melakukan peningkatan kualitas komunikasi untuk meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan. Untuk itu, BPK akan melaksanakan berbagai strategi komunikasi untuk mendapatkan masukan isu strategis pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, BPK akan terus meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern melalui empat langkah, yaitu pengendalian mutu pada tim pemeriksa, reviu silang oleh tim pemeriksa lainnya sebelum laporan hasil pemeriksaan diterbitkan, penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional pemeriksa dan Inspektorat Utama, serta *peer review* yang dilakukan oleh SAI negara lain.

BPK akan merencanakan, melaksanakan, dan berkoordinasi dengan sebaik mungkin dalam menjalankan strategi pemeriksaan yang telah ditetapkan. Selain itu, BPK juga berupaya memberikan inovasi-inovasi pemeriksaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas dan dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Tahun ini, BPK juga memiliki peran penting di kancah internasional. BPK salah satu penggagas dari adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs), berperan dalam memberikan tuntutan dan tahun ini karena kita sudah menyerahkan *Voluntary National Review* (VNR), maka persiapan SDGs di Indonesia juga akan menjadi contoh bagi negara lain.

Apresiasi Keluarga Pegawai,

Keakraban Keluarga Besar BPK dalam *Family Gathering*

JAKARTA - DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-71 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK), DIADAKAN BERBAGAI ACARA UNTUK MEMPERERAT JALINAN KOMUNIKASI DUA ARAH ANTARA PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI. TERMASUK JUGA KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERSIFAT MENGHIBUR UNTUK MELEPAS KEJENUHAN.

"Kita jadikan rangkaian kegiatan ini sebagai media untuk lebih merekatkan kebersamaan kita sebagai keluarga besar BPK sehingga kita bersama-sama bisa membangun BPK menjadi lebih besar lagi," kata Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua BPK saat *Family Gathering*, Sabtu (20/1) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.

Sesuai dengan tema HUT BPK ke-71 yaitu "Merajut Kebersamaan", *Family Gathering* bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat rasa persaudaraan antar pegawai BPK dan keluarga sebagai keluarga besar BPK. BPK sadar betul, seluruh kesuksesan yang diraih pegawainya tidak lepas dari peran keluarga.

Tidak lupa, Ketua BPK berpesan bagi seluruh keluarga pegawai BPK untuk terus memberikan motivasi, semangat serta

doa bagi suami, istri, ayah, ibu maupun kerabatnya agar dapat terus berkarya dan mengabdi kepada nusa dan bangsa melalui BPK.

Family Gathering kali ini dipandu oleh Tika dan Udjo Project Pop dengan penampilan tarian pembukaan serta pertunjukan karate dari satuan pengamanan BPK. Tidak lupa dilakukan pertukaran cendera mata antara BPK dan TMII yang diterima langsung oleh Ketua BPK dan Direktur Umum TMII, Bambang Parikesit. Secara simbolis pula, dilakukan pemotongan kue ulang tahun untuk memeriahkan acara.

Tidak hanya itu, disediakan pula *door prize* bagi peserta yang beruntung sebanyak 71 buah, sesuai dengan usia BPK saat ini.

Acara juga turut dimeriahkan oleh pemenang lomba senam maumere dari Unit Kerja Sekretariat Jenderal dan pemenang BPK *Talent Show* dari Auditorat Utama Investigasi yang merupakan bagian dari rangkaian acara HUT BPK ke-71.

Family Gathering ini, juga seolah-olah menjadi pesta rakyat karena menyediakan berbagai gerobak makanan tradisional bagi seluruh peserta yang hadir, bazar, dan juga *children play ground* bagi anak-anak pegawai BPK.

Tidak Lupa Jasa Pendahulu, BPK Ziarah Makam Peringati HUT BPK Ke-71

JAKARTA - TIDAK HANYA MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERBAU KESENIAN DAN KEKELUARGAAN, UNTUK MEMPERINGATI HUT BPK KE-71 JUGA MELAKUKAN ZIARAH MAKAM KE PARA PENDAHULU BPK. ZIARAH INI DILAKUKAN AGAR PIMPINAN DAN PEGAWAI BPK TIDAK LUPA JASA-JASA PARA PENDAHULU.

Ziarah dilakukan pada 12 Januari 2018 di sembilan lokasi. Lokasi pertama adalah Karet Bivak, tempat bersemayamnya Wakil Ketua BPK periode 2007-2010, Herman Widyananda dan Anggota BPK Hasan Akman periode 1973-1983.

Lokasi kedua, adalah pemakaman Menteng Pulo, tempat bersemayamnya R. Soerasno, mantan Ketua BPK periode 1947-1957. Lokasi ketiga adalah Tanah Kusir, tempat dimakamkannya Mochtar Usman Wakil Ketua BPK 1964-1966, Rivai Siata Anggota BPK 1993-1998, dan R.H Abdoelah Afandi Anggota BPK periode 1966-1973.

Lokasi keempat dan kelima berturut-turut adalah Pondok Kelapa dan Kp. Kandang-Jagakarsa. Sedangkan lokasi keenam dan tujuh, Cibatok Bogor dan Empang Tonjong Bogor. Pondok Kelapa disemayamkan Syahbudin Masulili Anggota BPK periode 1993-1998. Sedangkan di Kampung Kandang Jagakarsa disemayamkan Sugiarto Anggota BPK periode 1998-2004. Lokasi Bogor adalah tempat bersemayamnya Oey Tien Tion Wakil Ketua BPK periode 1950-1957, Karim Pringgodigdo Ketua BPK periode 1957-1961, Israwan Anggota BPK periode 1978-1983, Ajat Sudrajat Anggota BPK periode 1993-1998, serta Satrio Budihardjo Joedono Ketua BPK periode 1998-2004.

Lokasi ke delapan adalah Makam Imogiri Yogyakarta, tempat bersemayamnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Terakhir adalah ziarah makam M. Jusuf Ketua BPK periode 1983-1993 di Makasar. Pada setiap ziarah dipimpin oleh Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan BPK dan Ditama Binbangkum, serta AKN.

Ragam Potensi Pegawai BPK dalam Kebersamaan

SALAH SATU BENTUK PERAYAAN HUT BPK KE-71 BERTEMA "MERAJUT KEBERSAMAAN" ADALAH DISELENGGARAKANNYA PERLOMBAAN DI BIDANG KESENIAN, YAITU PERLOMBAAN SENAM SAJOJO DAN MAUMERE PADA 17 NOVEMBER 2017 DAN BPK TALENT SHOW PADA 7 DESEMBER 2017.

Perlombaan ini diselenggarakan sebagai wadah bagi pegawai BPK untuk menunjukkan bakat dan potensi serta kekompakan tim dalam menyajikan penampilan yang menarik.

Perlombaan senam Sajojo dan Maumere diikuti oleh 12 grup yang mewakili seluruh satuan kerja tingkat Eselon 1 di BPK. Kekompakan tim, kesesuaian kostum dan ketepatan gerak menjadi pertimbangan dewan juri dalam menentukan pemenangnya. Dari perlombaan ini terlihat kekompakan pegawai BPK bukan hanya dalam bekerja tetapi juga dalam berkarya.

Menyusul kegiatan lomba senam Sajojo dan Maumere, diselenggarakan BPK ***Talent Show***. Kali ini pegawai BPK ditantang untuk menampilkan bakat-bakat seni di bidang tari, menyanyi dan berkomedi. Sebanyak 16 peserta yang berpartisipasi dalam acara tersebut. "Saya terpana dengan bakat-bakat pegawai BPK," ujar Andre Hehanusa, yang menjadi ketua dewan juri dalam acara ini. "Poin penting dalam penilaian adalah dari sisi ***entertaining***-nya, bukan hanya penonton yang menikmati namun peserta juga ***enjoy*** dalam penampilannya."

Kegiatan ini memang diagendakan tiap tahun dalam rangkaian HUT BPK, selain untuk menjaring bakat-bakat pegawai, juga untuk meningkatkan kebersamaan diantara para pegawai. Dirgahayu BPK!

Auditor Utama Keuangan Negara I

HUT Ke-71, BPK Masuk ke Ruang-ruang Publik

MEMASUKI STASIUN PALMERAH, PENGUNJUNG DISUGUHI DENGAN PEMANDANGAN BARU. TEPAT DI DEKAT ESKALATOR MENUJU JALUR 1, SEBUAH MEDIA BESAR BERISI FOTO-FOTO BERIKUT KETERANGANNYA BERTAJUK "PERJALANAN BPK" TERPAMPANG MENARIK PERHATIAN PENGGUNA KERETA REL LISTRIK (KRL). MEDIA TERSEBUT MERUPAKAN INFORMASI MENGENAI PERJALANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK) DARI MASA KE MASA YANG DAPAT DIKETAHUI MASYARAKAT YANG DIKEMAS DALAM BENTUK PAMERAN FOTO.

Pameran tersebut diselenggarakan dalam rangka perayaan hari ulang tahun BPK yang ke-71. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan publik menyadari bahwa BPK merupakan lembaga milik publik yang tidak terlepas dari kiprah BPK dalam memeriksa keuangan negara.

"Dalam rangka ulang tahun BPK yang ke-71, kita merayakannya dengan mendekatkan kepada publik. Ini juga dikerjakan di beberapa perwakilan," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan pada Rabu (10/1/2018).

Yudi menjelaskan, ke depan, BPK harus mempunyai manfaat dan nilai buat publik. Hal itu penting karena BPK diharapkan menjadi bagian dari peningkatan kualitas pembangunan. Untuk mencapai tujuan itu, BPK ingin menggandeng publik sebagai penyedia informasi atau sebagai partner untuk memperkuat proses kerja BPK.

"Jadi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kiprah BPK ke depannya," ujarnya.

Selain itu, terobosan lain yang akan dilakukan BPK dalam menapaki usia ke-71

ini adalah peluncuran SIPADU (Sistem Pemantauan Aplikasi Pengaduan). SIPADU adalah sebuah aplikasi di gawai berbasis android. Melalui aplikasi tersebut, publik nantinya akan dapat mengadukan semua informasi ke BPK terkait keuangan negara.

Menurut Yudi, setelah menyampaikan aduan, nantinya publik akan dapat memantau progres dari aduan tersebut. Apakah sudah diselesaikan, ditunda, atau ditolak oleh BPK. Aplikasi tersebut diharapkan mampu menjadi penghubung harapan publik dengan BPK dalam era digital saat ini.

Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan

"Siang di BPK, malam di Hukum"

HENDAR RISTRIAWAN MENGAWALI KARIERNYA SEBAGAI PEGAWAI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SELEPAS BANGKU SMA. IA MENEMPUH PERJALANAN PANJANG. NAMUN, BAGINYA, PEKERJAAN BUKANLAH AKHIR. DI SELA-SELA KESIBUKAN, PRIA KELAHIRAN CILACAP INI TERUS MENYEMPATKAN DIRI UNTUK MENERUSKAN STUDI. MULAI GELAR SARJANA HUKUM DARI FAKULTAS HUKUM UI, S-2 DARI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA, HINGGA GELAR DOKTOR DARI UNIVERSITAS PADJAJARAN DIRAIHNYA.

Di BPK, di antaranya Hendar pernah bertugas sebagai Kepala Sub-Bagian Hukum dan Perundang-undangan (1992-1998), Kepala Sub-Auditorat (1998-2002), Kepala Perwakilan BPK di Banjarmasin (2002-2006), Inspektur Utama Pengawasan Intern dan Khusus (2006-2007), Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (2007-2010), dan akhirnya sebagai Sekretaris Jenderal (2010 hingga sekarang).

Selain berseloroh bahwa cita-citanya tidak tercapai, ayah dari dua putri dan kakek dari seorang cucu ini membagikan resep dan pengalamannya berkarya di BPK. Termasuk kiat membagi waktu yang dapat berguna bagi generasi muda. Berikut petikan wawancara *Warta Pemeriksa* dengan sosok ahli hukum yang berjiwa pendidik ini.

Bapak bekerja di BPK sejak lulus SMA. Masa bakti yang panjang dan dibarengi dengan kegiatan kuliah hingga gelar Doktor. Bisa cerita sekilas perjalanan karier?

"Saya dulu sekolah SMA di Kanisius sampai kelas dua. Saya mengamati, pada waktu itu lulusan Kanisius kok sedikit yang diterima di perguruan tinggi negeri. Lalu untuk kelas tiga saya pindah ke SMA Negeri 26 di Tebet agar peluang diterima di universitas negeri semakin besar. Akhirnya bisa masuk Fakultas Hukum UI. Sambil mulai bekerja di BPK."

Kemudian studi berlanjut ke S-2, hingga S-3. Keinginan untuk terus sekolah besar ya Pak?

"Ya, selepas SMA semua pendidikan saya Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Jadi, secara bercanda dibilangnya 'Kalau siang di BPK, sore sampai malam di Hukum' ha.. ha... ha... Ya, sampai S-3. Waktu mulai mengambil program S-3 itu saya baru dua tahun menjabat sebagai Sekjen. Waktu itu timbul pertanyaan dalam diri saya: Hendar, setelah kamu tidak lagi menjadi Sekjen mau menjadi apa? Pertanyaan itu terus mengusik, karena jabatan ini tidak mungkin berlangsung lama."

Apa yang memotivasi studi?

"Pada waktu itu saya bertanya-tanya, setelah menjadi Sekjen, selanjutnya ada tiga kemungkinan. Pertama, apakah saya akan melanjutkan karier di BPK sebagai Anggota, atau apakah mau berbisnis, atau apa? Posisi Sekjen itu bisa ada banyak peluang untuk merintis jalur bisnis. Akan tetapi, saya kemudian berpikir, apakah sebenarnya kekuatan diri saya? Kalau menjadi Anggota BPK, pada waktu itu saya merasa terlalu berat. Jadi pilihan itu saya hapus. Lalu, bagaimana kalau bisnis? Saya pikir-pikir, rasanya saya juga tidak ke sana.

Nah, banyak juga yang mengatakan bahwa kalau saya di program diklat, cara saya dalam mengajar enak. Makanya, kemudian saya berpikir untuk menjadi dosen saja setelah masuk usia pensiun. Masa pensiun saya nanti mulai Maret 2018. Itulah sebabnya saya dulu mengikuti program doktoral di Unpad. Alhamdulilah, setelah selesai S-3, saya langsung ditawari untuk menjadi dosen di sana. Sekarang pun saya sudah menjalani masa sebagai pengajar, di Universitas Nasional. Selesai jam kerja saya mengajar. Juga ada tawaran mengajar di tempat lain. Ya, hitung-hitung semuanya persiapan menyambut masa pensiun."

Bagaimana cara membagi waktunya?
"Saya selalu mengupayakan agar pulang kantor tepat waktu. Setiba di rumah, saya menyediakan waktu sampai jam sembilan malam untuk ngobrol atau bercengkerama bersama keluarga. Setelah itu, saya izin untuk membaca, menyelesaikan pekerjaan, atau menulis. Dua-tiga jam begitu, sampai jam 12 malam. Begitu rutinitasnya. Saya juga sedang menulis buku mengenai perbandingan antara badan pemeriksa di beberapa negara. Sedang *finishing,* sebentar lagi selesai. Kalau tulisan di *Jurnal Konstitusi* sudah terbit beberapa. Ya, itu untuk angka kredit, persiapan buat nanti mengajar juga."

Bapak disiplin sekali membagi waktu. Apa ada pengaruh pendidikan di masa kecil?
"Orang tua saya dulu guru. Waktu saya masih SD sampai SMA, kami kakak-beradik tujuh bersaudara selalu belajar bersama di meja makan. Kami diwajibkan oleh orang tua untuk selalu membaca bahan pelajaran dengan suara keras. Ya, 'kan ramai tuh. Rupanya itu juga cara orang tua kami agar tahu, kami sebenarnya belajar atau enggak. Kemudian, sewaktu bekerja, bagi saya memang penting untuk selalu meningkatkan kompetensi diri dalam pekerjaan."

Apa pengalaman berkesan dari awal-awal bekerja di BPK?
"Waktu masuk Biro Hukum BPK, ada psikotes sebagainya. Oleh psikolog, saya ditanya, masuk bekerja di BPK cita-cita saya apa? Saya menjawab, cita-cita saya adalah menjadi Kepala Biro Hukum BPK. Nah, kemudian itu menjadi cita-cita yang tidak pernah tercapai, karena Biro Hukum kemudian bubar, berubah nama menjadi Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum ha..ha..ha..."

Bapak menjabat sebagai Sekjen BPK sejak November 2010. Bagaimana dulu ceritanya?
"Saya menjadi Sekjen BPK itu dulu karena perintah atasan. Jadi memang amanah. Bukan karena kemauan saya. Pada waktu itu sempat ada yang tanya juga, mengapa mau menjadi Sekjen? 'Kamu tidak cocok jadi Sekjen, lebih cocok di bidang hukum' katanya. Saya jawab, ya ini perintah."

Tantangan terbesar pada awal jabatan sebagai Sekjen?
"Pada waktu itu masih marak kasus Bank Century. Ya, saya mempelajarilah, mendalami hasil-hasil pemeriksaannya dari aspek hukum. Di saat bersamaan, Pak Hadi Poernomo, Ketua BPK waktu itu, sedang mengembangkan *e-audit.* Kami berdiskusi bagaimana konsep itu bisa dikembangkan, sarana dan prasarananya. Beliau juga punya ide untuk membangun

suatu pusat data yang terintegrasi, untuk kepentingan pemeriksaan.

Tugas Sekjen lebih kepada manajemennya, bukan teknisnya. Posisi Sekjen sebenarnya lebih kepada masalah manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, humas, dan teknologi informasi. Sedangkan untuk eksternal, lebih banyak menghadapi media."

Dalam konteks internasional, tampaknya BPK sekarang cukup punya peran penting ya, Pak?

"Ya. Di tingkat Setjen (Sekretariat Jenderal), kami mengusulkan digelarnya forum untuk *sharing.* Kemudian, dalam bidang pusdiklat, kita di Indonesia punya pengalaman dan keunggulan dalam pemeriksaan terkait lingkungan dan bencana. Saya minta hal itu dimanfaatkan oleh pusdiklat agar bisa menjadi lembaga pendidikan bagi auditor-auditor internasional. Kita ketuanya dalam hal itu, juga dalam sekretariat lingkup ASEAN. Kalau ada tamu dari negara lain yang punya kompetensi khusus, kita undang untuk berbicara di pusdiklat.

Saya memang inginnya pusdiklat kita dikenal sampai ke lingkup internasional. Akhirnya, kita memang sering dipercaya untuk menyelenggarakan pelatihan berskala internasional. Kalau bisa, saya ingin agar orang-orang yang belajar di pusdiklat kita memiliki kebanggaan, karena telah belajar di pusdiklat kita. Jadi, pusdiklat kita harus punya reputasi. Ini harus dibangun. Saya katakan, para peserta diklat kita itu akan menjadi humas ke luar, mengenai kualitas pusdiklat kita."

Ke depannya, apa yang bisa dilakukan demi perkembangan BPK secara organisasi?

"Pertama, karakteristik BPK. Kalau kita bicara data, ya. Lebih dari 70 persen pegawai BPK berdomisili di Pulau Jawa, sementara BPK mempunyai 34 kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Di luar Pulau Jawa yang terbesar itu ada di Medan dan Makassar. Untuk wilayah timur jumlahnya kecil sekali. Pegawai BPK di Papua itu mungkin hanya nol koma sekian persen dari total. Ini suatu persoalan.

Yang kedua, kita bicara gender. Lebih dari 42 persen pegawai BPK itu wanita. Dalam perekrutan, yang wanita memang cukup menonjol. Namun, bisa muncul persoalan ketika pegawai wanita kemudian berkeluarga. Agak sulit jadinya, untuk ditempatkan di luar Pulau Jawa.

Kemudian, ada dalam budaya masyarakat kita, terutama di Jawa, bahwa mengurus orang tua yang sudah sepuh adalah kewajiban. Ini mendorong mereka sehingga pada usia tertentu minta ditempatkan kembali di Pulau Jawa agar mudah mengurus orang tua. Dalam manajemen SDM, hal-hal semacam itu juga perlu diperhitungkan. Kita sudah punya pola mutasi. Tapi, tetap saja faktanya yang lolos hasil seleksi dan persyaratan untuk menjadi pegawai BPK masih lebih banyak berasal dari Pulau Jawa."

Hal lain?

"Pegawai BPK umumnya punya kecenderungan tingkat kolesterolnya tinggi. Mungkin ada kaitannya dengan karakter pekerjaan. Banyak duduk, banyak pekerjaan, *overtime*. Nah, saya sendiri membiasakan diri untuk bekerja sambil berdiri. Ada meja khusus untuk itu. Hal-hal ini termasuk tantangan yang perlu dipikirkan jalan keluarnya. Fasilitas olahraga diperbanyak. Setiap hari Jumat kami sediakan berbagai fasilitas olahraga. Tapi ya itu, tetap saja susah mengajak karyawan berolahraga. Kecuali kalau ada *snack*, baru mau pada turun he.. he.. he...

Ada lagi satu hal, saya belajar dari pengalaman para senior. Mereka yang berhasil dalam bisnis setelah masa kerja di BPK umumnya memang telah memulai rintisan sejak lama. Kalau setelah pensiun baru mulai merintis, sulit sekali untuk berhasil. Bisnis itu juga perlu proses panjang, jatuh-bangun, 'kan?

Nah, sekarang ada program persiapan pensiun di BPK. Saya minta, karyawan yang dua atau tiga tahun lagi akan pensiun kita tawarkan program-program pendidikan terutama bisnis, termasuk model-model bisnisnya. Sebagai persiapan. Ini karena menurut pengalaman dan pengamatan saya, mereka yang baru mencoba beralih profesi setelah masa pensiun umumnya akan kesulitan. Karakter pekerjaan sebagai pegawai negeri tidak mengajarkan mereka dalam *entrepreneurship.* Mereka-mereka yang merancang dan mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum masa pensiun-lah yang akan berhasil."

Apa ada hobi yang dijalani seandainya ada waktu luang atau saat libur?

"*Fitness*. Tapi sebenarnya bukan hobi, ya. Melainkan karena kebutuhan. Kalau pekerjaan sedang banyak tentu ada tekanan psikologis. Daripada stresnya saya bawa ke rumah, saya mencari tempat *fitness*. Sedangkan untuk rileks, kalau saya biasanya dengan cara jalan bersama keluarga. Ya keluarlah begitu, makan atau jalan-jalan."

Ada pesan untuk karyawan BPK yang muda-muda, Pak?

"Terutama itu. Cintai dan kuasai pekerjaan. Di mana pun kita berada. Di mana pun kita ditempatkan. Nah, untuk bisa menguasai pekerjaan, kita harus bisa membagi waktu. Terutama dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang tugas kita. Belajar itu tidak boleh berhenti, pada level mana pun kita berada.

Pengetahuan juga tidak hanya soal ilmu pengetahuan dan teknis keterampilan. Tetapi juga hal-hal lain yang tidak bisa dipelajari dari buku. Misalnya belajar cara memimpin rapat, bagaimana berkomunikasi, cara menghadapi pimpinan, menghadapi bawahan, dan sebagainya. Jangan sekali-kali merasa puas. Saya sendiri banyak belajar dari para senior. Dari Pak Anwar Nasution, Pak Abdullah Zainie, Pak Hadi Poernomo, dan para pemimpin sekarang."

Puncak Rangkaian HUT, BPK Gelar Pengajian

SEBAGAI WUJUD RASA SYUKUR KEPADA ALLAH SWT DAN MENUTUP RANGKAIAN PERINGATAN HARI ULANG TAHUN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN YANG KE 71, BPK MENGGELAR ACARA BPK MENGAJI.

Acara yang di gelar pada hari selasa 23 januari 2018 Ba'da Dzuhur di masjid BPK Baitul Hasib, dihadiri oleh Anggota II BPK Agus Joko Pramono, Tortama II Bahtiar Arief, Eselon I Mahendro Sumarja, dan pejabat lainnya.

Kegiatan BPK Mengaji diikuti oleh para pegawai di lingkungan BPK. Pada acara tersebut, seluruh hadirin yang hadir dibagi dalam 30 kelompok yang mana masing-masing kelompok diharuskan membaca satu juz Al Quran. Pada kesempatan tersebut, panitia acara juga menghadirkan penceramah dari Pesantren Abdullah bin Mas'ud di Subang, Jawa Barat, Dr syaikh Ibrahim Ahmad Al Imad dan hafiz Al Quran, Hafidz Nur Salam.

Anggota II Agus Joko Pramono, menyambut baik diselenggarakannya kegiatan BPK Mengaji ini. Ia berharap, kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin dan dapat dijadikan sebagai momentum bersama sama mendekatkan diri pada Al Quran sebagai pedoman hidup serta meningkatkan keimanan, sehingga dapat mendukung penerapan nilai dasar, kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai insan BPK.

@bpkriofficial

@humasbpkri.
official

www.bpk.go.id

BPK RI
Official

@bpkri

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

B Badan

P Pemeriksa

K Keuangan

Tugas BPK

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Keceriaan
HUT BPK KE-71

BANYAK MOMEN MENYENANGKAN YANG TERJADI SAAT ULANG TAHUN BPK YANG KE-71. KECERIAAN, RASA SYUKUR, DAN KEBERSAMAAN, SEMUA TERANGKUM DALAM BINGKAI KAMERA. KAMI MEMBAGINYA UNTUK ANDA, PARA PEMBACA.

KOLASE FOTO

PERJALANAN
71
BPK RI

GRATIS
juga
GRATIS
FOTO
dapat
MUG GRATIS

KEUANGAN RI

FINISH

1 JANUARI
1947-2018
71
BPK RI
MERAJUT KEBERSAMAAN